

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja apabila terdapat perubahan terhadap rencana kerja dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Perubahan Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD SKPD yang bersangkutan.

II. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes -Tegal – Pemalang;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

III. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan arah pengembangan *e-government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yang cepat dan transparan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas dan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

IV. Sistematika Renja - SKPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2020 Triwulan II

2.2. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2021 TRIWULAN II

I. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen pada perubahan Rencana Kerja tahun 2021 melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika juga merupakan pengelola pendapatan yang berasal dari Retribusi Menara Telekomunikasi, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 realisasi Pendapatan masih 0.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar 48,70% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 7 bulan (6 bulan + THR).

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 51,30% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 6 bulan.
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 46,73% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan ATK selama 6 bulan.
- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 33,68% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan makanan dan minuman rapat selama 6 bulan.
- iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar 36,07% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 6 bulan.
- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran sebesar 17,82% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama 6 bulan.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar 29,74% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pembayaran rekening telepon 894001 selama 6 bulan dan pembelian pulsa untuk SMS center selama 6 bulan.
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 32,39% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan AC, Printer, PC dan Laptop selama 6 bulan.
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 47,79% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan alat dan bahan pembersih selama 6 bulan dan tenaga kebersihan sebanyak 3 orang selama 6 bulan.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar 32,16% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa Pemeliharaan kendaraan dan BBM kendaraan Dinas serta pembayaran pajak kendaraan dinas selama 6 bulan.
 - ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar 56,38% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan videotron selama 6 bulan.
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran sebesar 72,18% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa hibah LPPL Buana Asri dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui 2 media yaitu baliho dan pertunjukan rakyat secara daring.
 - ii. Layanan Hubungan Media dengan realisasi anggaran sebesar 57,97% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa iklan/greeting melalui media sebanyak 16 kali.
 - iii. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan realisasi anggaran sebesar 4,22%.

4. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 42,81% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pemeliharaan jaringan online Pemkab Sragen selama 6 bulan.
 - b. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 54,63% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa dokumen evaluasi SPBE dan Smart city sebanyak 1 dokumen.
 - ii. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan realisasi anggaran sebesar 0,00%.
 - iii. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar 19,29% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan bandwidth internet untuk jaringan online Pemkab Sragen dan sewa jaringan FO untuk 20 kecamatan selama 6 bulan.
 - iv. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan realisasi anggaran sebesar 0,00%.
 - v. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 35,98% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan TIK untuk masyarakat sebanyak 100 orang
5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar 81,57% dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa dokumen statistik sektoral sebanyak 1 dokumen.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen beserta target capaian realisasinya dirinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja tahun 2021 Triwulan II

No.	Indikator Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja tahun 2021 Triwulan II	
			Target	Realisasi
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan berbasis Tlk	%	100	100
2	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	%	50	35
3	Indeks SPBE	indeks	3,3	3.3
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks	50	70

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2021

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	6		7		8			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,058,545,860		184,271,452		1,221,699,280		39.94
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2,988,545,860		177,821,452		1,164,601,380		
	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase administrasi perkantoran tercukupi dan sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	410,605,120	30	75,525,062	70	148,552,679	70	36.18
2		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase administrasi perkantoran tercukupi</i>	100	110,144,410	30	7,234,670	70	28,843,380	70	26.19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	2,112,740	3	0	6	1,083,870	50	51.30
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis	12	18,035,770	3	3,378,670	6	8,428,610	50	46.73
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	14,998,000	3	2,678,000	6	5,052,000	50	33.68
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	4,997,900	0	0	6	1,802,900	50	36.07

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12	70,000,000	3	1,178,000	6	12,476,000	50	17.82
3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase administrasi perkantoran tercukupi	100	112,710,710	30	22,433,974	70	47,212,519	70	41.89
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi	12	7,800,000	3	246,344	6	2,319,559	50	29.74
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	34,068,000	3	5,314,000	6	11,036,000	50	32.39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan	12	70,842,710	3	16,873,630	6	33,856,960	50	47.79
4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100	187,750,000	60	45,856,418	70	72,496,780	70.00	38.61
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan roda 4 dan BBM kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	12	137,750,000	3	17,666,418	6	44,306,780	50	32.16
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan videotron	12	50,000,000	3	28,190,000	6	28,190,000	50	56.38
		INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian informasi Nasional Melalui: Media massa, Media baru, Media Tradisional, Media Interpersonal dan Media luar ruang	8	1,238,948,430	2	36,478,430	2	654,858,430	25	52.86
5		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis media penyebarluasan informasi	3	1,238,948,430	2	36,478,430	2	654,858,430	66.67	52.86

		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Hibah LPPL jumlah media penyampaian informasi program pemerintah Pertunjukkan rakyat	6	859,000,000	0	28,150,000	3	620,050,000	50.00	72.18
		Layanan Hubungan Media	Jumlah iklan/greeting melalui media dan jumlah bulan pemeliharaan pressroom	17	34,950,000	3	8,030,000	16	20,260,000	94.12	57.97
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah bulan kemitraan dengan jajaran pers	12	344,998,430	3	298,430	6	14,548,430	50	4.22
		APLIKASI INFORMATIKA	Web site milik pemerintah daerah	1	1,338,992,310	1	65,817,960	1	361,190,271	100	
6		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jaringan PD yang terkoneksi online dengan jaringan pemkab	100	294,999,000	100	63,250,000	100	126,279,000	100	42.81
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah bulan pemeliharaan jaringan online pembak Sragen dan jumlah titik terkoneksi jaringan fiber optik	12	294,999,000	3	63,250,000	6	126,279,000	50	42.81
7		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jaringan PD yang terkoneksi online dengan jaringan pemkab	100	1,043,993,310	100	2,567,960	100	234,911,271	100	22.50
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen evaluasi SPBE dan Smart City	2	74,997,780	0	2,567,960	1	40,974,211	50	54.63
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	25,000,000	0	0	0	0	0	-
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah bulan sewa bandwidth dan sewa jaringan FO untuk kecamatan	12	819,000,000	3	0	6	157,961,430	50	19.29
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Sosialisasi pemanfaatan internet sehat	1	25,000,000	0	0	0	0	0	-

II. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sragen merupakan SKPD yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Komunikasi dan informatika, statistic dan persandian. Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sragen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mulai tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan yang berasal dari Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan target pendapatan sebesar Rp. 600.000.000,00.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen s.d. Triwulan II Tahun 2021

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021 TW II	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Persentase PD yang Menggunakan layanan berbasis TIK	-	Persentase PD yang Menggunakan layanan berbasis TIK	60	80	90	95	100	100	100	-	-	
2	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	-	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	-	10	30	40	50	35	35	50	-	
3	Indeks SPBE	-	Indeks SPBE	-	2,5	3	3,2	3,3	3,35	3,3	3,3	3,35	
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	24	30	40	50	50,3	70	70	60	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

I. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada arah kebijakan nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2015 – 2020 sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Sedangkan berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 bidang komunikasi dan informatika memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi. Dan berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi.

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung program – program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”**. Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.

3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari Misi Bupati dapat ditarik misi yang paling sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen adalah MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sragen yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Sragen terpilih tahun 2016 – 2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)		LOKASI	SUMBER DANA	PENETAPAN APBD 2021 (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERGESERAN APBD di BPKPD (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
		INDIKATOR KELUARAN	VOLUME & SATUAN						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 10 + 11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7,499,799,860	7,599,799,860	1,406,292,098	9,006,091,958
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7,429,799,860	7,529,799,860	759,492,098	8,289,291,958
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,851,859,120	4,951,859,120	385,161,998	5,337,021,118
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,441,254,000	4,441,254,000	132,393,298	4,573,647,298
2.16.01.2.05.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	Kab. Sragen	DAU	4,441,254,000	4,441,254,000	132,393,298	4,573,647,298
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	100,000,000	0	100,000,000
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyampaian informasi peraturan perundang undangan di bidang cukai kepada masyarakat	9	Kab. Sragen	DAU	0	100,000,000	0	100,000,000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					110,144,410	110,144,410	23,400,000	133,544,410
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Kab. Sragen	DAU	2,112,740	2,112,740	0	2,112,740

2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	Kab. Sragen	DAU	18,035,770	18,035,770	37,337,440	55,373,210
		jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	2						
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	12	Kab. Sragen	DAU	14,998,000	14,998,000	0	14,998,000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Kab. Sragen	DAU	4,997,900	4,997,900	0	4,997,900
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12	Kab. Sragen	DAU	70,000,000	70,000,000	-13,937,440	56,062,560
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112,710,710	112,710,710	0	112,710,710
2.16.01.2.08.02	Penediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi	12	Kab. Sragen	DAU	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	Kab. Sragen	DAU	34,068,000	34,068,000	0	34,068,000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan	12	Kab. Sragen	DAU	70,842,710	70,842,710	0	70,842,710
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					187,750,000	187,750,000	229,368,700	417,118,700
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bulan pemeliharaan kendaraan roda 4 dan BBM kendaraan dinas/operasional	12	Kab. Sragen	DAU	137,750,000	137,750,000	6,600,000	144,350,000
		jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	30						
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan peralatan videotron	12	Kab. Sragen	DAU	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				DAU	0	0	98,138,700	98,138,700
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				DAU	0	0	124,630,000	124,630,000

2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1,238,948,430	1,238,948,430	-100,000,000	1,138,948,430
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1,238,948,430	1,238,948,430	-100,000,000	1,138,948,430
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Hibah LPPL	1	Kab. Sragen	DAU	859,000,000	859,000,000	-109,500,000	749,500,000
		jumlah media penyampaian informasi program pemerintah	2						
		Pertunjukan rakyat	2						
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	jumlah iklan/greeting melalui media	10	Kab. Sragen	DAU	34,950,000	34,950,000	9,500,000	44,450,000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah bulan kemitraan dengan jajaran pers	12	Kab. Sragen	DAU	344,998,430	344,998,430	0	344,998,430
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					1,338,992,310	1,338,992,310	474,330,100	1,813,322,410
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota					294,999,000	294,999,000	233,714,600	528,713,600
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah bulan pemeliharaan jaringan online Pemkab. Sragen	12	Kab. Sragen	DAU	294,999,000	294,999,000	233,714,600	528,713,600
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota					1,043,993,310	1,043,993,310	240,615,500	1,284,608,810
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen evaluasi SPBE dan Smart City	1	Kab. Sragen	DAU	74,997,780	74,997,780	0	74,997,780
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	Kab. Sragen	DAU	25,000,000	25,000,000	52,500,000	77,500,000
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah bulan sewa bandwidth dan sewa jaringan FO untuk Kecamatan	12	Kab. Sragen	DAU	819,000,000	819,000,000	188,115,500	1,007,115,500

2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah sosialisasi pemanfaatan internet sehat	1	Kab. Sragen	DAU	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peserta pelatihan TIK melalui Broadband Learning Center Kab. Sragen	300	Kab. Sragen	DAU	99,995,530	99,995,530	0	99,995,530
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					0	0	646,800,000	646,800,000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					0	0	646,800,000	646,800,000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0	0	646,800,000	646,800,000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	jumlah IDS dan IPS yang disediakan	1 dokumen	Kab. Sragen	DAU	0	0	646,800,000	646,800,000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	Kab. Sragen	DAU	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	JUMLAH					7,499,799,860	7,599,799,860	1,419,141,680	9,018,941,540

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, perencanaan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENETAPAN APBD 2021 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2021 (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,851,859,120	5,337,021,118
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,441,254,000	4,573,647,298
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,441,254,000	4,573,647,298
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	100,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	100,000,000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	110,144,410	133,544,410
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,112,740	2,112,740
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,035,770	55,373,210
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,998,000	14,998,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,997,900	4,997,900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,000,000	56,062,560
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,710,710	112,710,710
Penediaan Jsa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	7,800,000	7,800,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,068,000	34,068,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70,842,710	70,842,710
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187,750,000	417,118,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137,750,000	144,350,000
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	50,000,000	50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	98,138,700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	124,630,000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,238,948,430	1,138,948,430
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,238,948,430	1,138,948,430
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	859,000,000	749,500,000
Layanan Hubungan Media	34,950,000	44,450,000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	344,998,430	344,998,430
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1,338,992,310	1,813,322,410
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota	294,999,000	528,713,600
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	294,999,000	528,713,600
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	1,043,993,310	1,284,608,810
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74,997,780	74,997,780
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	25,000,000	77,500,000
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	819,000,000	1,007,115,500
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	25,000,000	25,000,000

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	99,995,530	99,995,530
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	646,800,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0	646,800,000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	646,800,000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	0	646,800,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	70,000,000	70,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	70,000,000	70,000,000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000	70,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	70,000,000	70,000,000
JUMLAH	7,499,799,860	9,006,091,958

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen Tahun 2021 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan.

Sragen, 3 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN

Dra. YUNIARTI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670620 199403 2 006